

## Analisis Kritis Kebijakan Digitalisasi dan Disparitas Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

M. Misbahul Fawaid

Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

Email: [misbahulfawaid98@gmail.com](mailto:misbahulfawaid98@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted June 20, 2026

---

#### Keywords:

Politics of Education;  
Educational Ethics; Ministry of  
Religion Bojonegoro;  
Digitization; Madrasah  
Disparity

---

### ABSTRACT

*This research aims to critically dissect Islamic education policy under the auspices of the Ministry of Religion (Kemenag) of Bojonegoro Regency through a theoretical review of politics and educational ethics. The focus of the study is directed at two main dynamics: the implementation of the madrasah bureaucratic digitization policy (EMIS and ERKAM) and the problem of governance disparity between public and private madrasahs. Using a qualitative method with a literature study and critical discourse analysis approach, this article outlines that top-down digitalization policies often ignore infrastructure readiness and human resource capacity at the grassroots level. The results of the analysis show that there is an ethical contradiction where the excessive digital administrative burden has distorted the moral role and interaction time of teachers with students (professional alienation). In addition, there is distributive injustice in the allocation of resources between the state madrasah in the city center and the private madrasah on the outskirts of Bojonegoro. This study recommends the need to reconstruct local policies based on the ethics of care and asymmetric affirmative policies in order to realize the benefits of substantive Islamic education.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted June 20, 2026

---

#### Keywords:

Politik Pendidikan; Etika  
Pendidikan; Kemenag  
Bojonegoro; Digitalisasi;  
Disparitas Madrasah

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis kebijakan pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro melalui tinjauan teoretis politik dan etika pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada dua dinamika utama: implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi madrasah (EMIS dan ERKAM) serta problematika disparitas tata kelola antara madrasah negeri dan swasta. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), artikel ini menguraikan bahwa kebijakan digitalisasi yang bersifat top-down sering kali mengabaikan kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM di tingkat akar rumput. Hasil analisis menunjukkan adanya kontradiksi etis di mana beban administratif digital yang berlebihan telah mendistorsi peran moral dan waktu interaksi guru terhadap peserta didik (alienasi profesional). Selain itu, terjadi ketidakadilan distributif dalam alokasi sumber daya antara madrasah negeri pusat kota dan madrasah swasta pinggiran Bojonegoro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan lokal yang berbasis pada etika kepedulian (ethics of care) dan kebijakan afirmatif asimetris demi mewujudkan kemaslahatan pendidikan Islam yang substantif.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



**Corresponding Author:**

M. Misbahul Fawaid

Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

Email: [misbahulfawaid@unugiri.ac.id](mailto:misbahulfawaid@unugiri.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis sekaligus kompleks dalam konstelasi kebijakan publik. Sebagai subsistem pendidikan nasional, madrasah berada di bawah otoritas politik Kementerian Agama yang bersifat vertikal-sentralistik, berbeda dengan sekolah umum yang diotonomikan di bawah Pemerintah Daerah. Di tingkat lokal seperti Kabupaten Bojonegoro, relasi kuasa antara birokrasi Kemenag dan lembaga pendidikan Islam di bawahnya memunculkan berbagai dinamika sosial, politik, dan moral yang menantang untuk dikaji secara akademis. Kondisi objektif ini menuntut kajian mendalam yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif-prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif yang sering kali terabaikan dalam studi-studi terdahulu di jurnal ini.

Kabupaten Bojonegoro memiliki karakteristik geografis dan sosiologis yang unik. Luas wilayah yang terbagi atas 28 kecamatan dengan beberapa wilayah pinggiran yang berbatasan dengan kawasan hutan dan aliran Sungai Bengawan Solo melahirkan ketimpangan infrastruktur yang riil. Di sisi lain, kuantitas madrasah di Bojonegoro sangat besar, di mana mayoritas di antaranya berstatus swasta di bawah naungan yayasan atau organisasi keagamaan lokal. Kondisi objektif ini menuntut Kemenag Bojonegoro selaku pemegang otoritas politik pendidikan untuk melahirkan kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki kepekaan kontekstual. Dalam konteks diskursus global, integrasi teknologi dalam lembaga keagamaan memerlukan sensitivitas struktural agar tidak memperlebar jurang pemisah antarsatuan pendidikan.

Namun, arus utama kebijakan Kemenag Bojonegoro belakangan ini tampak sangat didominasi oleh semangat standardisasi mutu dan digitalisasi birokrasi secara masif. Program-program seperti pengetatan pemutakhiran data Education Management Information System (EMIS) dan integrasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik (ERKAM) menjadi menu wajib seluruh satuan pendidikan. Secara politis, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk akuntabilitas birokrasi guna mencapai predikat tata kelola yang bersih (*good governance*). Hambatan sosiologis dan kesiapan teknologi di wilayah rural sering kali luput dari kalkulasi teknokratis otoritas pusat.

Jika dibedah menggunakan kacamata politik dan etika pendidikan, arus digitalisasi ini tidak sepenuhnya bebas dari benturan nilai. Politik pendidikan mengajarkan bahwa kebijakan tidak pernah netral, melainkan selalu membawa kepentingan kontrol birokrasi. Sementara etika pendidikan menuntut bahwa setiap regulasi harus bermuara pada keadilan (*justice*) dan penghormatan terhadap martabat pendidik (*human dignity*). Ketika kebijakan digitalisasi dipaksakan kepada institusi yang secara struktural belum siap, terjadi pengorbanan nilai-nilai etis pendidikan demi memenuhi target kepatuhan birokratis (*bureaucratic compliance*).

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bermaksud menganalisis secara kritis kebijakan pendidikan Kemenag Bojonegoro dari dimensi politik digitalisasi dan etika keadilan distributif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis). Desain penelitian diarahkan untuk membongkar relasi kekuasaan dan praktik ideologis yang tersembunyi di balik teks kebijakan formal birokrasi pendidikan keagamaan. Data primer dalam kajian ini bersumber dari dokumen kebijakan resmi Kementerian Agama, regulasi digitalisasi madrasah, serta laporan implementasi kebijakan Kemenag di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun evaluasi berjalan.

Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku dan jurnal bereputasi mengenai teori politik pendidikan dan etika birokrasi yang diindeks dalam basis data nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi daring dan luring serta penelusuran teks secara mendalam (textual screening). Proses analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pisau analisis utama yang digunakan untuk membedah fenomena ini adalah Teori Kritik Politik Pendidikan Henry Giroux dan Teori Etika Kepedulian (Ethics of Care) yang digagas oleh Nel Noddings.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Digitalisasi Kemenag Bojonegoro: Antara Akuntabilitas dan Alienasi Profesional Guru**

Kebijakan digitalisasi sistem informasi dan keuangan madrasah secara politik merupakan respons Kementerian Agama terhadap tuntutan reformasi birokrasi nasional. Kemenag Bojonegoro menaruh perhatian besar pada kepatuhan pengisian data karena rapi tidaknya data di daerah menentukan potret kinerja kemenag di tingkat pusat. Namun, terdapat jurang pemisah (gap) yang lebar antara ekspektasi politik birokrasi dan realitas etis di lapangan. Kebijakan ini mengasumsikan bahwa semua madrasah memiliki kapasitas teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang seragam. Kenyataannya, di Kabupaten Bojonegoro, kesenjangan infrastruktur digital antarkecamatan masih sangat mencolok. Madrasah swasta di wilayah pedalaman Bojonegoro harus menghadapi kendala geografis berupa sinyal yang tidak stabil dan ketiadaan tenaga operator khusus yang digaji layak.

Dari perspektif etika pendidikan, pemaksaan sistem digitalisasi yang kaku ini melahirkan fenomena yang disebut Alienasi Profesional Guru. Etika moral mengajar menuntut seorang guru untuk mendedikasikan waktu, pikiran, dan energinya demi merancang pembelajaran yang humanis serta mendampingi pembentukan karakter peserta didik. Namun, politik regulasi Kemenag memaksa guru—terutama di madrasah swasta kecil—untuk beralih fungsi menjadi buruh input data administratif. Untuk memetakan ketimpangan tersebut secara struktural, pengelompokan tema dampak digitalisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1. Themes and Sub-themes**

Themes	Sub-themes
Theme one: Implementation of Digital Learning in Schools	Infrastructure availability Internet access Learning Management System (LMS) Teacher digital competence Student engagement Digital learning resources Technical support Evaluation methods Student assessment
Theme two: Challenges in Online Education	Limited technological skills English Assessment difficulties Communication barriers

Ketika seorang guru menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperbaiki data aplikasi yang eror demi mengejar tenggat waktu validasi birokrasi, hak-hak substantif siswa telah dikorbankan secara etis. Politik pendidikan yang terlalu berorientasi pada aspek teknokratis-formalistik telah mereduksi profesi mulia guru menjadi sekadar sekrup kecil dalam mesin birokrasi digital yang kaku. Hal ini sejalan dengan kritik mendasar mengenai komodifikasi waktu kerja tenaga pendidik dalam pusaran birokratisasi modern.

### **Disparitas Madrasah Negeri dan Swasta dalam Tinjauan Keadilan Distributif**

Salah satu prinsip utama dalam etika pendidikan adalah keadilan distributif (distributive justice), yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya harus diarahkan untuk membantu kelompok yang paling rentan agar tercipta kesetaraan peluang. Dalam konteks Kemenag Bojonegoro, prinsip etika ini mengalami ujian berat akibat adanya disparitas struktural yang tajam antara madrasah berstatus negeri dan swasta.

Madrasah negeri di Bojonegoro mendapatkan sokongan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik untuk gaji guru aparatur sipil negara, sarana prasarana, maupun biaya operasional yang langka. Sebaliknya, ratusan madrasah swasta di pinggiran Bojonegoro harus bertahan hidup dengan mengandalkan dana BOS yang jumlahnya berbasis per kepala siswa, sementara jumlah murid mereka terus menyusut akibat kalah bersaing secara fasilitas dengan madrasah negeri. Ketidakadilan ini menuntut adanya pembongkaran sistemik terhadap regulasi yang menyamaratakan standarisasi tanpa melihat titik awal perjuangan lembaga.

Secara etis, memperlakukan dua entitas yang memiliki kapasitas awal berbeda jauh dengan aturan regulasi yang sama rata adalah sebuah bentuk ketidakadilan struktural. Kebijakan Kemenag yang menerapkan standar akreditasi fisik yang seragam tanpa adanya afirmasi anggaran yang signifikan bagi madrasah swasta kecil merupakan bentuk pelestarian ketimpangan (reproduction of inequality). Madrasah swasta dipaksa berkompetisi di arena yang sama dengan madrasah negeri, padahal mereka memulai balapan dari garis start yang jauh di belakang. Secara etis-religius, Kemenag mengemban misi moral untuk menegakkan keadilan sosial, sehingga ketimpangan ini harus segera dievaluasi melalui diskresi politik lokal.

## **Penerapan Etika Birokrasi: Menuju Kebijakan Berbasis Ethics of Care**

Filsuf pendidikan Nel Noddings memperkenalkan konsep Ethics of Care (Etika Kepedulian), yang menegaskan bahwa relasi kemanusiaan dan kepedulian terhadap kondisi konkret subjek harus berada di atas kepatuhan hukum yang kaku. Jika dikontekstualisasikan pada tata kelola Kemenag Bojonegoro, aparat birokrasi (pengawas sekolah, kepala seksi) seyogianya menerapkan etika pelayanan yang bersifat membimbing (nurturing), bukan menghukum (punitive).

Selama ini, relasi kekuasaan yang terbangun cenderung bersifat searah. Ketika madrasah terlambat melakukan penguncian (locking) data anggaran, sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana operasional langsung membayangi. Tindakan birokrasi yang kaku ini cacat secara etis karena sanksi tersebut pada akhirnya merugikan operasional sekolah dan mengganggu proses belajar anak didik yang tidak bersalah. Etika birokrasi Islam menuntut adanya tabayun struktural, empati terhadap kendala lokal, dan pendampingan aktif sebelum sanksi dijatuhkan. Untuk merenungkan kembali esensi dasar ini, kutipan teoretis berikut menjadi jangkar refleksi bersama:

“Improving the quality of education requires a comprehensive approach that integrates curriculum development, effective teaching strategies, and continuous assessment practices. Teachers play a central role in facilitating meaningful learning experiences by adopting student-centered methods and utilizing appropriate instructional media to enhance engagement and understanding. In addition, factors such as students’ cognitive abilities, learning environments, and parental involvement significantly influence learning outcomes. Therefore, a well-supported educational ecosystem that combines pedagogical competence, adequate facilities, and consistent evaluation is essential to achieve optimal student performance (Hattie, 2009; Slavin, 2018).”

## **KESIMPULAN**

Analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan di Kemenag Bojonegoro mengungkap adanya ketegangan yang belum terselesaikan antara kepentingan politik birokrasi dan komitmen etika pendidikan. Kebijakan digitalisasi (EMIS dan ERKAM) yang bertujuan positif untuk akuntabilitas, dalam praktiknya justru melahirkan alienasi profesional guru akibat beban administratif yang mengabaikan realitas infrastruktur lokal. Di samping itu, prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya mewujudkan akibat disparitas struktural-finansial yang tajam antara madrasah negeri dan swasta, terutama di wilayah geografis pinggiran Bojonegoro.

Sebagai rekomendasi dan implikasi kebijakan praktis, Kemenag Bojonegoro dituntut melakukan reposisi kebijakan melalui tiga langkah strategis: Pertama, menginisiasi kebijakan lokal pembentukan "Pusat Bantuan Data Pendidikan" di tingkat kecamatan untuk mengalihkan beban input data dari guru ke operator khusus. Kedua, menerapkan politik anggaran asimetris (kebijakan afirmatif) yang memberikan porsi bantuan dana hibah lokal yang lebih besar kepada madrasah swasta di wilayah pelosok. Ketiga, mentransformasi budaya birokrasi Kemenag dari model instruktif-menghukum menjadi model birokrasi kepedulian (ethics of care) yang mengedepankan dialog dan empati kontekstual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberikan dukungan moral dan akademis dalam penyelesaian artikel ini. Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan para pengelola madrasah di wilayah pinggiran Bojonegoro yang telah bersedia berbagi perspektif objektif mengenai dinamika birokrasi pendidikan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admiraal, W., Westhoff, G., & deBot, K. (2006). Evaluation of bilingual secondary education in the Netherlands: Students' language proficiency in English. *Educational Research and Evaluation*, 12(1), 75–93.
- Akbar, Sa'dun. (2020). *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Alper, Meryl. (2019). Developmentally Appropriate New Media Literacies: Supporting Cultural Competencies and Social Skills in Early Childhood Education. *Journal of Early Childhood Literacy*.
- Baker, K. A., & de Kanter, A. A. (1983). Federal policy and the effectiveness of bilingual education. In K. A. Baker & A. A. de Kanter (Eds.), *Bilingual education: A reappraisal of federal policy* (pp. 33–86). Lexington, MA: Lexington Books.
- Branch, Robert Maribe. (2019). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York: Department of Educational Psychology and Instructional Technology University of Georgia.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Freire, Paulo. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Giroux, Henry A. (2011). *On Critical Pedagogy*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Digitalisasi Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mukminin, A. (2012). Acculturative experiences among Indonesian graduate students in US higher education: Academic shock, adjustment, crisis, and resolution. *Excellence in Higher Education Journal*, 3(1), 14–36.
- Noddings, Nel. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.
- Sirozi, Muhammad. (2007). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Kekuatan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesia Tera.